KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL INDONESIA TAHUN 2020–2025

Septy Idola Simamora[1], Christella Miranda Josephine Simbolon[2], Tria Indah Syaharani Lubis[3], Irma Siagian[4]
[1,2,3] Pendidikan Ekonomi FEB Universitas Negeri Medan
[1]septyidola.7231141007@mhs.unimed.ac.id, [2]christellasimbolon@gmail.com, [3]triaindahsyaharanilubis@gmail.com, [4]irmasiagian@unimed.ac.id

ABSTRACT

Maintaining internal and external economic balance is a major challenge for Indonesia as an open economy. This study analyzes Indonesia's economic developments and the role of monetary and fiscal policies in maintaining these balances during 2020–2025. The study employs a descriptive quantitative approach using secondary data from Statistics Indonesia, Bank Indonesia, the Ministry of Finance, and relevant academic literature. Internal balance is examined through economic growth, inflation, and monetary policy indicators, while external balance is assessed through balance-of-payments developments and foreign exchange reserves. Fiscal conditions are analyzed using state revenue, expenditure, and budget deficit indicators. The results show that Indonesia's economy recovered from a contraction of 2.07 percent in 2020 and grew by 5.11 percent in 2025. Inflation fluctuated throughout the observation period, while the BI-Rate changed in response to evolving domestic and global conditions. The state budget continued to support economic activity, although the deficit increased again in 2024 and 2025. External indicators also demonstrate the importance of maintaining adequate reserves and monitoring capital flows and current-account developments. The findings suggest that monetary and fiscal policies should be coordinated to support sustainable growth, price stability, fiscal resilience, and external stability. Since this study is descriptive, the observed developments do not establish causal relationships between individual policy instruments and economic outcomes.

***Keywords**: Monetary Policy, Fiscal Policy, Internal Balance, External Balance, Indonesia*

ABSTRAK

Keseimbangan internal dan eksternal merupakan tantangan penting bagi Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbuka. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan ekonomi Indonesia dan peran kebijakan moneter serta fiskal dalam menjaga kedua keseimbangan tersebut selama 2020–2025. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan literatur ilmiah yang relevan. Keseimbangan internal dianalisis melalui pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator kebijakan moneter, sedangkan keseimbangan eksternal ditinjau melalui perkembangan neraca pembayaran dan cadangan devisa. Kondisi fiskal dianalisis menggunakan indikator pendapatan negara, belanja negara, dan defisit anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

perekonomian Indonesia pulih dari kontraksi sebesar 2,07 persen pada 2020 dan tumbuh sebesar 5,11 persen pada 2025. Inflasi berfluktuasi selama periode pengamatan, sedangkan BI-Rate mengalami perubahan mengikuti perkembangan kondisi domestik dan global. APBN tetap berperan mendukung aktivitas ekonomi, meskipun defisit kembali meningkat pada 2024 dan 2025. Indikator eksternal juga memperlihatkan pentingnya menjaga kecukupan cadangan devisa serta memantau arus modal dan perkembangan transaksi berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal perlu dikoordinasikan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, stabilitas harga, ketahanan fiskal, dan stabilitas eksternal. Karena penelitian ini bersifat deskriptif, perkembangan yang diamati tidak membuktikan hubungan sebab-akibat antara instrumen kebijakan tertentu dan hasil ekonomi.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Keseimbangan Internal, Keseimbangan Eksternal, Indonesia

A. Pendahuluan

Perekonomian terbuka menghadapi tantangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga sekaligus mempertahankan ketahanan dalam hubungan ekonomi dengan negara lain. Dua sasaran tersebut dikenal sebagai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Keseimbangan internal berkaitan dengan kondisi perekonomian domestik, terutama pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan kesempatan kerja. Sementara itu, keseimbangan eksternal berkaitan dengan keberlanjutan transaksi internasional, arus modal, nilai tukar, dan kemampuan suatu negara memenuhi kewajiban pembayaran luar negerinya.

Keseimbangan internal dan eksternal saling berkaitan. Peningkatan permintaan domestik dapat mendorong produksi, konsumsi, dan investasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan impor dan tekanan inflasi. Sebaliknya, perubahan nilai tukar dan arus modal dapat memengaruhi harga barang impor, biaya produksi, serta keputusan investasi di dalam negeri. Oleh karena itu, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi domestik sekaligus perkembangan ekonomi internasional.

Indonesia mengalami perubahan kondisi ekonomi yang cukup besar selama 2020–2025. Pada 2020, perekonomian mengalami kontraksi

sebesar 2,07 persen akibat pandemi COVID-19. Setelah itu, ekonomi kembali tumbuh sebesar 3,69 persen pada 2021, meningkat menjadi 5,31 persen pada 2022, dan tumbuh sebesar 5,05 persen pada 2023 serta 5,03 persen pada 2024. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen (Badan Pusat Statistik [BPS], 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026). Perkembangan ini memperlihatkan pemulihan setelah kontraksi, meskipun stabilitas pertumbuhan tetap perlu disertai pengendalian inflasi dan pemeliharaan ketahanan eksternal.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi merupakan indikator penting dalam menilai kondisi internal. Inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan meningkatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Sebaliknya, tekanan harga yang rendah tidak selalu menunjukkan kondisi ekonomi yang baik apabila disertai lemahnya permintaan dan meningkatnya pengangguran. Karena itu, kebijakan ekonomi perlu memperhatikan hubungan antara stabilitas harga dan aktivitas produksi.

Dalam menghadapi perubahan kondisi tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peran melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dijalankan melalui pengelolaan penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara. Belanja pemerintah dapat mendukung permintaan agregat, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan perlindungan sosial. Sementara itu, kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia melalui instrumen seperti suku bunga kebijakan, operasi moneter, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar untuk mendukung stabilitas nilai rupiah.

Meskipun memiliki sasaran yang saling berhubungan, kebijakan fiskal dan moneter tidak selalu memberikan dampak yang sama. Kebijakan fiskal ekspansif dapat mendorong permintaan domestik, tetapi peningkatan permintaan juga dapat menambah tekanan inflasi atau impor. Di sisi lain, kenaikan suku bunga dapat membantu mengendalikan tekanan harga dan memengaruhi arus modal, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya pinjaman bagi rumah tangga dan perusahaan. Oleh sebab itu, efektivitas kebijakan perlu dianalisis berdasarkan kondisi perekonomian dan mekanisme transmisi yang berlangsung.

Kerangka Mundell–Fleming memberikan dasar untuk memahami hubungan kebijakan ekonomi dalam perekonomian terbuka. Fleming (1962) dan Mundell (1962) menjelaskan bahwa pengaruh kebijakan moneter dan fiskal bergantung pada karakteristik perekonomian, mobilitas modal, dan sistem nilai tukar. Kerangka ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang efektif untuk mencapai keseimbangan internal belum tentu menghasilkan dampak yang sama terhadap keseimbangan eksternal.

Penelitian Santoso dan Basuki (2009) menggunakan model Mundell–Fleming untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa dalam model dan periode yang diteliti, jumlah uang beredar lebih efektif dalam meningkatkan produk domestik bruto dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah. Sementara itu, Fikri (2021) menemukan bahwa respons variabel moneter Indonesia terhadap guncangan kebijakan tidak selalu sesuai dengan prediksi teori secara sederhana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan perlu dipahami dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan mekanisme transmisi yang berlaku.

Walaupun penelitian terdahulu telah membahas efektivitas kebijakan moneter dan fiskal, perkembangan ekonomi pada 2020–2025 perlu ditinjau kembali karena periode tersebut mencakup pandemi, pemulihan ekonomi, perubahan tekanan inflasi, dan ketidakpastian global. Analisis terhadap perkembangan indikator ekonomi dalam periode tersebut dapat membantu menjelaskan tantangan koordinasi kebijakan, meskipun pendekatan deskriptif tidak dapat mengukur pengaruh kausal masing-masing instrumen kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan keseimbangan internal dan eksternal Indonesia selama 2020–2025 serta menganalisis peran kebijakan moneter dan fiskal berdasarkan kerangka teori ekonomi terbuka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengelolaan APBN, dan indikator eksternal. Hasilnya juga diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang menguji hubungan kebijakan ekonomi menggunakan metode kuantitatif yang lebih mendalam.

B. Metode Penelitian

Identifikasi masalah dan penetapan periode penelitian

↓

Pengumpulan data sekunder dari BPS, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan artikel ilmiah

↓

Pengelompokan indikator keseimbangan internal, kebijakan, dan keseimbangan eksternal

↓

Perbandingan data tahunan selama 2020–2025

↓

Interpretasi hasil menggunakan teori kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Mundell–Fleming

↓

Penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi

Sumber: Diolah penulis (2026).

Untuk menjaga ketepatan analisis, data yang berasal dari publikasi berbeda tidak langsung dianggap sepenuhnya sebanding apabila menggunakan definisi atau basis pelaporan yang berbeda. Hal ini terutama diperhatikan pada data realisasi APBN, yang dapat mengalami pembaruan antara laporan awal dan laporan yang telah diaudit. Oleh karena itu, angka dalam tabel digunakan untuk menggambarkan kecenderungan umum dan perlu dirujuk kembali pada publikasi sumber sebelum digunakan dalam naskah final.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk menggambarkan perkembangan aktivitas produksi dalam suatu negara. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator keseimbangan internal karena menunjukkan perubahan nilai barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian.

Tabel 1 Pertumbuhan ekonomi indonesia tahun 2020-2025

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	-2,07
2021	3,69
2022	5,31
2023	5,05
2024	5,03

2025	5,11

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026).

Tabel 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada 2020, kemudian kembali tumbuh positif pada 2021. Pertumbuhan meningkat pada 2022 hingga mencapai 5,31 persen, lalu berada pada kisaran 5 persen selama 2023–2025. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan 5,03 persen pada 2024.

Kontraksi pada 2020 menunjukkan besarnya gangguan yang dialami perekonomian selama pandemi. Pembatasan aktivitas masyarakat dan perubahan kegiatan usaha memengaruhi konsumsi, investasi, serta produksi. Pemulihan pada 2021–2022 menunjukkan perbaikan aktivitas ekonomi setelah tekanan pandemi mereda. Namun, perkembangan pertumbuhan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu kebijakan karena pemulihan juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi kesehatan masyarakat, permintaan domestik, perdagangan internasional, dan aktivitas sektor usaha.

Dalam konteks kebijakan fiskal, belanja pemerintah dapat membantu menjaga daya beli dan menopang aktivitas ekonomi ketika sektor swasta menghadapi tekanan. Program perlindungan sosial dan pengeluaran pemerintah dapat membantu mempertahankan konsumsi, sedangkan belanja infrastruktur berpotensi meningkatkan kapasitas produksi dalam jangka panjang. Akan tetapi, dampak belanja terhadap pertumbuhan bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, dan kemampuan program meningkatkan produktivitas.

Kebijakan moneter juga berperan melalui pengaruhnya terhadap biaya pembiayaan dan kondisi likuiditas. Suku bunga yang rendah dapat mendukung konsumsi dan investasi, sedangkan pengetatan moneter dapat diperlukan ketika tekanan inflasi meningkat. Dalam praktiknya, kebijakan moneter perlu memperhitungkan jeda waktu transmisi dan kemungkinan bahwa perubahan suku bunga tidak langsung diikuti perubahan konsumsi maupun investasi.

Dengan demikian, pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021–2025 dapat dibaca

sebagai perkembangan yang berlangsung bersamaan dengan penyesuaian kebijakan dan perubahan kondisi domestik serta global. Data ini menunjukkan pemulihan dan stabilitas pertumbuhan, tetapi belum cukup untuk menentukan kontribusi masing-masing instrumen kebijakan.

Perkembangan Inflasi dan Kebijakan Moneter

Inflasi menunjukkan perubahan tingkat harga barang dan jasa secara umum. Stabilitas harga penting karena inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan meningkatkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Oleh karena itu, inflasi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keseimbangan internal.

Tabel 2 Inflasi Indonesia Tahun 2020-2025

Tahun	Inflasi (%)
2020	1,68
2021	1,87
2022	5,51
2023	2,61
2024	1,57
2025	2,92

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, statistik inflasi tahunan.

Berdasarkan Tabel 2, inflasi Indonesia relatif rendah pada 2020 dan 2021, kemudian meningkat menjadi 5,51 persen pada 2022. Inflasi turun menjadi 2,61 persen pada 2023 dan 1,57 persen pada 2024, sebelum meningkat kembali menjadi 2,92 persen pada 2025. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan harga berubah sepanjang periode penelitian.

Peningkatan inflasi pada 2022 berlangsung ketika perekonomian sedang pulih dan menghadapi tekanan harga komoditas serta energi. Perubahan harga barang yang diperdagangkan secara internasional dapat memengaruhi biaya produksi dan harga domestik. Di samping itu, gangguan pasokan dan perubahan permintaan juga dapat memengaruhi inflasi. Karena sumber tekanan harga berbeda-beda, respons kebijakan perlu memperhatikan penyebab inflasi dan bukan hanya angka inflasi agregat.

Bank Indonesia dapat memengaruhi permintaan agregat melalui suku bunga kebijakan dan instrumen moneter lainnya. Kenaikan suku bunga cenderung meningkatkan biaya pinjaman sehingga dapat menahan konsumsi dan investasi.

Kebijakan ini dapat membantu mengurangi tekanan permintaan, tetapi juga berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat membantu mendukung pembiayaan, tetapi perlu mempertimbangkan risiko terhadap inflasi dan nilai tukar.

Tabel 3 BI-Rate Pada Akhir Tahun 2020-2025

Tahun	Inflasi (%)
2020	3,75
2021	3,50
2022	5,50
2023	6,00
2024	6,00
2025	4,75

Sumber: Bank Indonesia, statistik BI-Rate.

Tabel 3 menunjukkan bahwa BI-Rate turun dari 3,75 persen pada akhir 2020 menjadi 3,50 persen pada akhir 2021. Selanjutnya, BI-Rate meningkat menjadi 5,50 persen pada akhir 2022 dan 6,00 persen pada akhir 2023. Tingkat tersebut bertahan hingga akhir 2024, kemudian turun menjadi 4,75 persen pada akhir 2025.

Perubahan BI-Rate memperlihatkan adanya penyesuaian arah kebijakan moneter sepanjang periode penelitian. Suku bunga yang rendah pada masa awal pandemi sejalan dengan kebutuhan mendukung pemulihan ekonomi. Kenaikan suku bunga pada 2022–2024 berlangsung ketika tekanan inflasi dan ketidakpastian global menjadi pertimbangan penting. Sementara itu, penurunan suku bunga pada 2025 menunjukkan perubahan kondisi kebijakan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.

Namun, pergerakan BI-Rate tidak dapat dijadikan bukti tunggal bahwa kebijakan moneter menyebabkan inflasi turun atau pertumbuhan meningkat. Inflasi juga dipengaruhi oleh harga pangan, energi, nilai tukar, biaya distribusi, dan kondisi pasokan. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, ekspor, belanja pemerintah, dan faktor lain. Fikri (2021) menunjukkan bahwa respons variabel moneter Indonesia terhadap guncangan kebijakan tidak selalu sesuai dengan prediksi teori secara sederhana. Hal ini memperkuat pentingnya membaca data kebijakan bersama dengan kondisi ekonomi yang melatarbelakanginya.

Dari sisi keseimbangan internal, tantangan kebijakan moneter adalah menjaga inflasi agar tetap

terkendali tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap aktivitas ekonomi. Kebijakan yang terlalu longgar dapat menambah tekanan permintaan dalam kondisi tertentu, sedangkan pengetatan yang terlalu kuat berpotensi menahan konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, keputusan moneter perlu mempertimbangkan proyeksi inflasi, pertumbuhan, kondisi nilai tukar, dan risiko global.

Perkembangan Kebijakan Fiskal dan APBN

Kebijakan fiskal berperan dalam memengaruhi aktivitas ekonomi melalui pengelolaan penerimaan dan belanja negara. Pemerintah dapat menggunakan belanja untuk menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, memberikan perlindungan sosial, dan mendukung sektor yang menghadapi tekanan. Di sisi lain, penerimaan negara dibutuhkan untuk membiayai program dan menjaga keberlanjutan fiskal.

Tabel 4 Realisasi APBN Indonesia Tahun 2020-2025

Tahun	Pendapatan Negara (Rp Triliun)	Belanja Negara (Rp Triliun)	Defisit (Rp Triliun)	Defisit Terhadap PDB
2020	1.647,8	2.595,5	947,7	6,14
2021	2.011,3	2.786,4	775,1	4,57
2022	2.635,8	3.096,3	460,4	2,35
2023	2.774,3	3.121,9	347,6	1,61
2024	2.842,5	3.350,3	507,8	2,29
2025	2.756,3	3.451,4	695,1	2,92

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, publikasi realisasi APBN dan APBN KiTa.

Tabel 4 menunjukkan bahwa defisit APBN terhadap PDB mencapai 6,14 persen pada 2020. Rasio tersebut menurun menjadi 4,57 persen pada 2021, 2,35 persen pada 2022, dan 1,61 persen pada 2023. Pada 2024, rasio defisit meningkat menjadi 2,29 persen dan kembali meningkat menjadi 2,92 persen pada 2025.

Defisit yang tinggi pada 2020 mencerminkan kebutuhan pembiayaan untuk merespons pandemi dan menjaga aktivitas ekonomi. Setelah itu, penurunan defisit hingga 2023 menunjukkan perubahan kondisi anggaran seiring pemulihan ekonomi dan penyesuaian penerimaan serta belanja negara.

Peningkatan defisit pada 2024–2025 menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal tetap menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan belanja dan penerimaan.

Dalam teori ekonomi, defisit anggaran tidak selalu berarti kebijakan fiskal gagal. Ketika perekonomian mengalami kontraksi, peningkatan belanja dapat membantu menjaga permintaan agregat. Namun, penilaian terhadap defisit perlu memperhatikan tujuan pembiayaan, kualitas belanja, sumber pendanaan, serta kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pada masa mendatang.

Belanja yang meningkatkan produktivitas, seperti infrastruktur yang tepat sasaran, pendidikan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, berpotensi memberikan manfaat jangka panjang. Sebaliknya, efektivitas fiskal dapat menjadi terbatas apabila belanja tidak menghasilkan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, kualitas dan komposisi belanja sama pentingnya dengan besaran anggaran.

Dari sisi penerimaan, kemampuan mengumpulkan pendapatan negara berperan dalam menjaga ruang fiskal. Penerimaan yang memadai membantu pemerintah membiayai program prioritas dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan defisit. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang berkelanjutan memerlukan kombinasi antara belanja yang efektif, penerimaan yang kuat, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati.

Santoso dan Basuki (2009) menunjukkan bahwa efektivitas relatif kebijakan moneter dan fiskal dapat berbeda dalam model ekonomi terbuka. Namun, hasil tersebut berasal dari model dan periode penelitian tertentu sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal selalu kurang efektif. Peran fiskal dapat menjadi sangat penting ketika perekonomian menghadapi guncangan besar atau ketika terdapat kebutuhan publik yang tidak dapat dipenuhi secara memadai oleh sektor swasta.

Perkembangan Keseimbangan Eksternal Indonesia

Keseimbangan eksternal berkaitan dengan transaksi ekonomi Indonesia dengan negara lain dan

kemampuan perekonomian menghadapi perubahan kondisi global. Beberapa indikator yang dapat digunakan adalah neraca pembayaran, transaksi berjalan, arus modal, nilai tukar, dan cadangan devisa. Analisis terhadap indikator tersebut diperlukan karena kondisi eksternal dapat memengaruhi stabilitas harga dan aktivitas ekonomi domestik.

Neraca pembayaran mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dan bukan penduduk. Salah satu komponennya adalah transaksi berjalan yang meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Karena cakupannya lebih luas daripada perdagangan barang, surplus perdagangan barang tidak selalu berarti transaksi berjalan mengalami surplus.

Bank Indonesia melaporkan bahwa pada triwulan IV 2025, neraca pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar US$6,1 miliar, sedangkan transaksi berjalan mengalami defisit sebesar US$2,5 miliar atau sekitar 0,7 persen dari PDB. Pada akhir Desember 2025, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US$156,5 miliar, setara dengan sekitar 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah (Bank Indonesia, 2026).

Perbedaan antara neraca pembayaran dan transaksi berjalan tersebut dapat dijelaskan melalui struktur neraca pembayaran. Transaksi berjalan merupakan salah satu komponen, sedangkan neraca pembayaran juga mencakup transaksi modal dan finansial serta perubahan cadangan devisa. Dengan demikian, surplus neraca pembayaran dapat terjadi bersamaan dengan defisit transaksi berjalan ketika komponen lainnya memberikan kontribusi yang cukup besar.

Cadangan devisa merupakan salah satu penyangga penting bagi ketahanan eksternal. Cadangan tersebut membantu mendukung kebutuhan pembayaran internasional dan memberi ruang bagi otoritas untuk menghadapi tekanan di pasar valuta asing. Akan tetapi, jumlah cadangan devisa yang besar tidak berarti seluruh risiko eksternal telah hilang. Perubahan arus modal, suku bunga internasional, harga komoditas, dan permintaan global tetap dapat memengaruhi nilai tukar dan neraca pembayaran.

Dalam kerangka Mundell–Fleming, perubahan suku bunga domestik dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar, sedangkan kebijakan fiskal dapat memengaruhi permintaan agregat dan impor. Pengaruh tersebut bergantung pada sistem nilai tukar, tingkat mobilitas modal, ekspektasi investor, dan kondisi ekonomi global (Fleming, 1962; Mundell, 1962). Karena itu, kebijakan untuk menjaga keseimbangan eksternal tidak cukup hanya berfokus pada perdagangan barang, tetapi perlu mempertimbangkan keseluruhan neraca pembayaran.

Kebijakan moneter berperan dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengelola kondisi moneter, sedangkan kebijakan fiskal dapat mendukung ketahanan ekonomi melalui belanja yang produktif dan pengelolaan anggaran yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, peningkatan produktivitas dan daya saing produksi domestik juga penting agar perekonomian tidak terlalu rentan terhadap perubahan permintaan dan harga di pasar internasional.

Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Menjaga Keseimbangan

Kebijakan moneter dan fiskal memiliki instrumen serta mekanisme transmisi yang berbeda, tetapi keduanya memengaruhi kondisi makroekonomi. Kebijakan fiskal dapat memengaruhi permintaan agregat melalui belanja dan penerimaan negara, sedangkan kebijakan moneter memengaruhi kondisi pembiayaan, likuiditas, ekspektasi inflasi, dan nilai tukar. Perbedaan instrumen tersebut membuat koordinasi diperlukan agar kebijakan tidak saling menghambat dalam mencapai sasaran ekonomi.

Ketika perekonomian mengalami kontraksi, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menjaga daya beli dan mendukung kegiatan ekonomi. Pada saat yang sama, kebijakan moneter dapat menyediakan kondisi pembiayaan yang mendukung pemulihan selama tidak menimbulkan risiko berlebihan terhadap stabilitas harga dan nilai tukar. Namun, ketika permintaan meningkat terlalu cepat dan menimbulkan tekanan inflasi, kebijakan moneter mungkin perlu lebih berhati-hati, sementara kebijakan fiskal perlu memperhatikan

komposisi belanja dan dampaknya terhadap permintaan.

Dari perspektif keseimbangan eksternal, peningkatan permintaan domestik juga dapat meningkatkan impor. Jika peningkatan impor tidak diimbangi oleh penerimaan ekspor dan pendapatan eksternal lainnya, tekanan terhadap transaksi berjalan dapat meningkat. Dalam keadaan tersebut, kebijakan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara dukungan terhadap aktivitas domestik dan pemeliharaan ketahanan eksternal. Hal ini tidak berarti bahwa impor harus selalu ditekan, sebab impor barang modal dan bahan baku juga dapat mendukung produksi dan ekspor pada masa mendatang.

Perkembangan data 2020–2025 menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Pertumbuhan ekonomi mengalami pemulihan setelah kontraksi 2020, inflasi meningkat pada 2022 lalu menurun sebelum naik kembali pada 2025, dan BI-Rate mengalami penyesuaian sepanjang periode penelitian. Pada sisi fiskal, defisit APBN menurun hingga 2023 kemudian meningkat kembali pada 2024–2025. Sementara itu, data neraca pembayaran dan cadangan devisa menunjukkan bahwa ketahanan eksternal tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan ekonomi.

Pola tersebut mendukung pandangan bahwa kebijakan moneter dan fiskal perlu dianalisis secara bersamaan. Namun, penelitian deskriptif ini tidak membuktikan bahwa perubahan satu instrumen kebijakan secara langsung menyebabkan perubahan indikator tertentu. Hubungan yang terlihat dapat dipengaruhi oleh faktor lain, termasuk harga komoditas global, gangguan pasokan, perubahan permintaan internasional, dan keputusan pelaku ekonomi.

Secara praktis, terdapat beberapa implikasi yang dapat diperhatikan. Pertama, kebijakan moneter perlu mempertahankan kredibilitas dalam menjaga stabilitas harga sambil memperhatikan dampak suku bunga terhadap konsumsi dan investasi. Kedua, kebijakan fiskal perlu memperkuat kualitas belanja dan memastikan program pemerintah memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Ketiga, pengelolaan

anggaran perlu memperhatikan kemampuan penerimaan dan keberlanjutan pembiayaan. Keempat, pemantauan transaksi berjalan, arus modal, nilai tukar, dan cadangan devisa perlu dilakukan secara terpadu untuk mengantisipasi perubahan kondisi global.

Dengan demikian, sinergi kebijakan moneter dan fiskal bukan berarti kedua kebijakan harus selalu menggunakan arah yang sama. Koordinasi justru diperlukan agar perbedaan instrumen dan sasaran dapat dikelola secara konsisten. Kebijakan yang tepat perlu disesuaikan dengan sumber tekanan ekonomi, keadaan siklus bisnis, dan risiko domestik maupun global.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami pemulihan setelah kontraksi pada 2020 dan mencapai pertumbuhan sebesar 5,11 persen pada 2025. Inflasi berfluktuasi selama periode penelitian, sedangkan BI-Rate mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan kondisi domestik dan global. Pada sisi fiskal, defisit APBN menurun dari 2020 hingga 2023 sebelum meningkat kembali pada 2024 dan 2025. Pada sisi eksternal, perkembangan neraca pembayaran dan cadangan devisa memperlihatkan pentingnya menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi perubahan kondisi internasional.

Berdasarkan kerangka teori ekonomi terbuka, kebijakan moneter berperan dalam menjaga stabilitas harga dan kondisi moneter, sedangkan kebijakan fiskal berperan mendukung aktivitas ekonomi melalui pengelolaan penerimaan dan belanja negara. Kedua kebijakan dapat memengaruhi keseimbangan internal maupun eksternal melalui permintaan agregat, biaya pembiayaan, nilai tukar, dan arus modal. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, keberlanjutan fiskal, dan ketahanan eksternal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan deskriptif dan indikator agregat tahunan. Analisis ini tidak mengukur besarnya pengaruh kausal kebijakan moneter maupun fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan transaksi eksternal. Selain itu, pembahasan mengenai

keseimbangan eksternal masih terbatas pada indikator terpilih.

Penelitian berikutnya dapat menggunakan data triwulanan atau bulanan dan metode ekonometrika, seperti VAR atau SVAR, untuk menguji respons variabel ekonomi terhadap perubahan kebijakan. Penelitian lanjutan juga dapat menganalisis secara lebih rinci peran kualitas belanja pemerintah, struktur ekspor-impor, dan arus modal dalam menjaga keseimbangan internal serta eksternal Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2021). *Ekonomi Indonesia tahun 2020 turun sebesar 2,07 persen*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik. (2022). *Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh 3,69 persen.* Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik. (2023). *Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31 persen.* Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik. (2024). *Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh 5,05 persen.* Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik. (2025). *Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh 5,03 persen.* Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/en/pressRelease/2025/02/05/2408/indonesia-s-economic-growth-2024-was-5-03-percent

Badan Pusat Statistik. (2026). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html

Bank Indonesia. (n.d.). *BI-Rate.* https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/BI-Rate.aspx

Bank Indonesia. (2026). *Laporan kebijakan moneter triwulan IV 2025.* https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-IV-2025.aspx

Fikri, A. A. H. S. (2021). Analisis simultan sektor moneter di Indonesia (pendekatan parsial Mundell-Fleming). *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan,* 18(1), 95–103. https://doi.org/10.21831/jep.v18i1.39895

Fleming, J. M. (1962). Domestic financial policies under fixed and under floating exchange rates. *IMF Staff Papers*, 9(3), 369–380.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *APBN KiTa: Kinerja dan fakta, kuartal IV 2025.*

https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/b1259fa9-5650-478a-970f-3e7ecb0e4303/Publikasi-APBNKITA-Q4-2025.pdf

Mundell, R. A. (1962). The appropriate use of monetary and fiscal policy for internal and external stability. *IMF Staff Papers*, 9(1), 70–79.

Santoso, T., & Basuki, M. U. (2009). Dampak kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian Indonesia: Aplikasi model Mundell-Fleming. *Jurnal Organisasi dan Manajemen,* 5(2), 108–128. https://doi.org/10.33830/jom.v5i2.250.2009